

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan ekonomi semata, tetapi juga harus mencerminkan perubahan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, baik dilihat melalui aspek sosial, budaya, maupun kesejahteraan individu. Proses pembangunan idealnya mampu menjawab beragam kebutuhan dasar serta aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di dalamnya. Sadono (2010), mengartikan pembangunan sebagai suatu proses jangka panjang yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan per kapita secara berkesinambungan, yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dipahami sebagai rangkaian proses yang diarahkan untuk menghasilkan perbaikan kondisi secara berkelanjutan jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya, sehingga melalui pembangunan ekonomi, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, yang terlihat dari bertambahnya kesejahteraan dan kemakmuran secara berkelanjutan (Lestari, 2020). Namun demikian, menurut Kuncoro (2005), faktor utama yang dapat menghambat proses pembangunan dan menyebabkan ketertinggalan suatu negara salah satunya ialah dengan adanya masalah tingginya tingkat kemiskinan yang masih belum teratasi secara optimal.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan penting yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai indikator kesejahteraan, kemiskinan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan rendahnya

pendapatan, melainkan juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari sisi pangan, kesehatan, pendidikan, maupun perumahan. Permasalahan ini bersifat multidimensional karena menyangkut akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara umum (Prakarsa, 2023).

Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat keterbatasan individu, tetapi disebabkan oleh ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi. Ketika proses pembangunan tidak berjalan secara merata seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penciptaan lapangan kerja, kualitas pendidikan dan kesehatan belum merata, atau ketika kebijakan sosial seperti upah layak tidak optimal maka kemiskinan akan tetap bertahan dan menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan digambarkan sebagai suatu lingkaran setan (*vicious cycle*) yang saling berkaitan antar faktor satu dengan yang lain dan sulit diputus apabila tidak ada intervensi yang tepat. Individu atau rumah tangga yang memiliki tingkat produktivitas rendah cenderung memperoleh pendapatan yang rendah pula, sehingga menempatkan mereka pada kondisi rentan miskin. Rendahnya pendapatan menyebabkan keterbatasan konsumsi, termasuk akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Kondisi kesehatan yang tidak optimal pada akhirnya menurunkan kemampuan seseorang untuk bekerja secara produktif, yang kemudian memperkuat kembali kondisi pendapatan rendah dan mempertahankan mereka dalam jeratan kemiskinan (Idris, 2022). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang bersifat siklus dan multidimensi ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terencana secara adil.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Berbagai program strategis telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, permasalahan kemiskinan masih belum sepenuhnya dapat diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 tingkat kemiskinan Indonesia masih sebesar 8,47 persen atau sebanyak 23,85 juta jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Salah satu provinsi yang masih menghadapi tantangan tersebut adalah Provinsi Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2025 sebesar Rp3.403,17 triliun, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya aktivitas ekonomi tersebut seharusnya mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat penurunan kemiskinan. Namun demikian, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2025 masih mencapai 9,50 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,47 persen (BPS, 2025). Selain itu, sekitar 16,23 persen dari total penduduk miskin Indonesia berada di Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Jawa Timur tidak hanya menjadi tantangan pembangunan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap pencapaian target penurunan kemiskinan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang

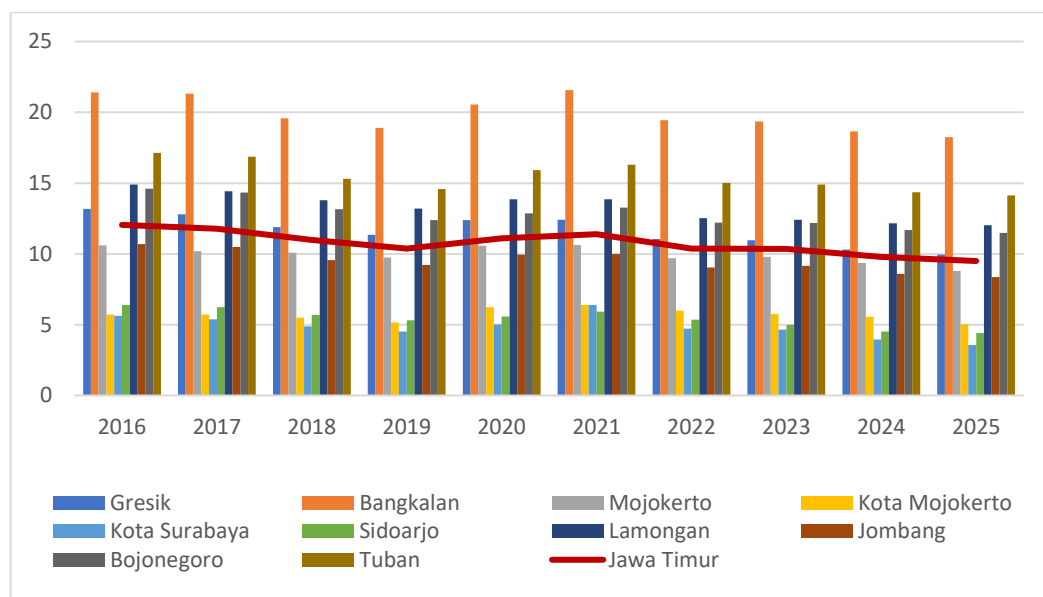
lebih mendalam pada kawasan-kawasan strategis yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Salah satu kawasan strategis tersebut adalah Gerbangkertosusila Plus yang terdiri atas Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban. Kawasan ini ditetapkan sebagai Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa Gerbangkertosusila Plus memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pengembangan infrastruktur sekaligus sebagai motor pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Dengan karakteristik tersebut, kawasan ini diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong penurunan kemiskinan melalui penyebaran manfaat pembangunan.

Namun demikian, sebagai kawasan yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi, Gerbangkertosusila Plus masih menampung sekitar 31,4 persen dari total penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi penurunan kemiskinan secara optimal. Dengan kata lain, keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di kawasan

Gerbangkertosusila Plus sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus, diperlukan pengamatan pada tingkat masing-masing kabupaten/kota. Analisis pada tingkat wilayah penting dilakukan karena setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan pembangunan yang berbeda sehingga perkembangan tingkat kemiskinannya tidak selalu menunjukkan pola yang sama. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016–2025 menunjukkan dinamika yang beragam sebagaimana disajikan pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Data Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Gerbangkertosusila Plus Tahun 2016-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, diolah.

Data persentase penduduk miskin di Gerbangkertosusila Plus periode 2016–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok, dengan peningkatan terjadi pada hampir seluruh wilayah pada tahun 2020–2021 sebagai dampak

pandemi Covid-19. Setelah tahun 2021, tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun dengan laju yang berbeda pada setiap kabupaten/kota.

Pada tahun 2025, Kabupaten Bangkalan masih mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 18,25%, sedangkan Kota Surabaya memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,56%. Kabupaten Mojokerto (8,79%), Kabupaten Jombang (8,36%), Kabupaten Sidoarjo (4,40%), dan Kota Mojokerto (5,05%) juga menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah. Sementara itu, Kabupaten Gresik (9,95%), Kabupaten Bojonegoro (11,49%), Kabupaten Lamongan (12,03%), dan Kabupaten Tuban (14,13%) masih memiliki tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota tersebut menunjukkan bahwa capaian penurunan kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus belum berlangsung secara seragam. Padahal kawasan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya aktivitas ekonomi belum tentu diikuti oleh penurunan kemiskinan yang merata pada seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang diduga memengaruhi kemiskinan, antara lain pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, kondisi kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus juga tidak dapat dilepaskan dari adanya keterkaitan antarwilayah. Kabupaten/kota di kawasan ini saling terhubung melalui aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, perdagangan, investasi, dan jaringan transportasi. Keterkaitan tersebut memungkinkan terjadinya efek limpahan

(*spillover effect*) sehingga perubahan kondisi sosial ekonomi pada suatu wilayah dapat berkaitan dengan kondisi wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, analisis kemiskinan tidak hanya perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, tetapi juga hubungan spasial antarwilayah.

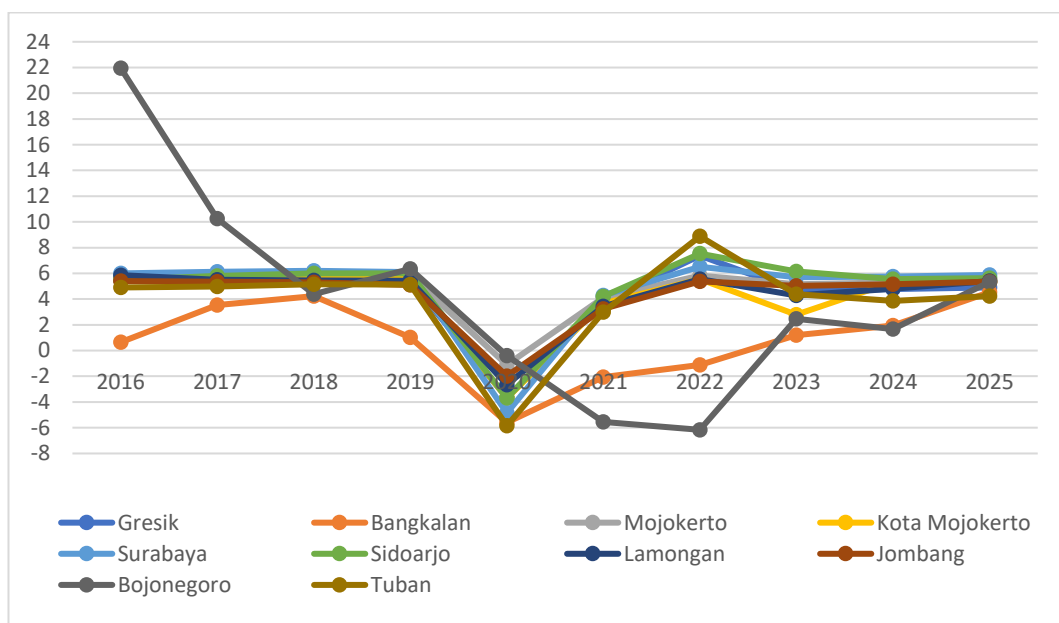
Salah satu faktor sosial ekonomi yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel penting yang perlu dianalisis dalam penelitian ini.

Laporan *World Development Report on Poverty* yang diterbitkan oleh World Bank pada tahun 1990 menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menurunkan kemiskinan karena mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno (2006), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan meningkatnya kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung rendah, aktivitas ekonomi

cenderung melambat sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat juga menjadi terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, perkembangan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016–2025 perlu dianalisis untuk mengetahui dinamika pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah. Perkembangan tersebut, dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 1. 2 Data Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Gerbangkertosusila Plus Tahun 2016-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, diolah.

Dinamika pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016–2025 menunjukkan perkembangan yang beragam. Hampir seluruh wilayah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Kontraksi terdalam terjadi di Kabupaten Tuban sebesar -5,85% dan Kabupaten Bangkalan sebesar -5,59%. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro mengalami kontraksi terpanjang dan terdalam hingga tahun 2022 sebesar -6,16%, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi di wilayah tersebut berlangsung lebih lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Memasuki periode pemulihan, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar kabupaten/kota kembali meningkat, seperti Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7,53% pada tahun 2022 dan Kota Surabaya sebesar 5,87% pada tahun 2025. Perbedaan perkembangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah tersebut menunjukkan adanya variasi kinerja perekonomian di kawasan Gerbangkertosusila Plus. Fenomena tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Simon Kuznets dan hasil empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat serta berkelanjutan akan mampu dalam menghasilkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan individu yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Hal ini juga diperkuat oleh teori *trickle down effect* yang menerangkan jika hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menetes ke bawah dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah sehingga dapat menurunkan kemiskinan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak merata, maka penurunan kemiskinan dapat berjalan lambat atau bahkan tidak terjadi (Ginting & Rasbin, 2010).

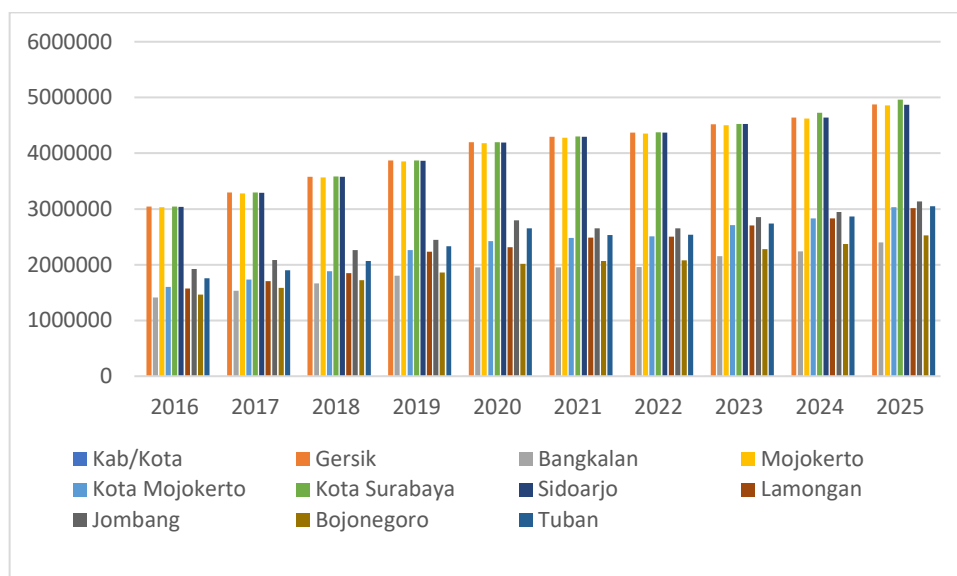
Hasil empiris mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wangtafendirra (2022) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada jumlah penduduk miskin, hal ini dikarenakan oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tidak diikuti langsung dengan pengurangan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Hal serupa juga terlihat dalam penelitian Br Hutabarat *et al.*, (2025)

bahwa kemiskinan memang dipengaruhi secara negatif oleh pertumbuhan ekonomi, namun efeknya cenderung lemah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berdampak negatif dan signifikan pada tingkatan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Temuan ini sejalan oleh teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith, bahwa peningkatan output dan pendapatan nasional akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas serta menurunkan jumlah penduduk miskin.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat berbeda pada setiap wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa karakteristik ekonomi daerah turut memengaruhi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, khususnya di kawasan Gerbangkertosusila Plus yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah dengan karakteristik, cakupan, dan pendekatan analisis yang berbeda. Sementara itu, Gerbangkertosusila Plus merupakan kawasan metropolitan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat integrasi ekonomi dan keterkaitan antarwilayah yang relatif tinggi. Karakteristik tersebut memungkinkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berbeda dengan wilayah lain sehingga diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

Faktor lainnya yang berperan dalam mempengaruhi dinamika kemiskinan adalah tingkat upah minimum. Upah minimum berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak, sekaligus menjadi alat untuk menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Berdasarkan data periode tahun 2016 hingga 2025, kabupaten dan kota di kawasan Gerbangkertosusila Plus mengalami peningkatan nilai upah minimum dari tahun ke tahun, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi antar wilayah seperti grafik berikut:



Gambar 1. 3 Upah Minimum di Gerbangkertosusila Plus Tahun 2016-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, diolah.

Perkembangan upah minimum di wilayah Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016–2025 menunjukkan adanya tren peningkatan positif di seluruh daerah, meskipun besaran upah minimum masih bervariasi antar wilayah. Wilayah dengan basis industrialisasi tinggi seperti Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik secara konsisten mempertahankan nilai upah minimum tertinggi, yang pada tahun 2025 mencapai kisaran di atas 4 juta rupiah. Sebaliknya, daerah yang ekonominya masih didominasi sektor primer atau jasa tradisional seperti Lamongan, Tuban,

Bojonegoro, dan Jombang memiliki upah minimum yang stabil namun berada pada kisaran 2–3 juta rupiah. Perbedaan besaran upah minimum tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat perlindungan pendapatan pekerja antar wilayah yang berpotensi memengaruhi kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas upah minimum dalam menekan tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

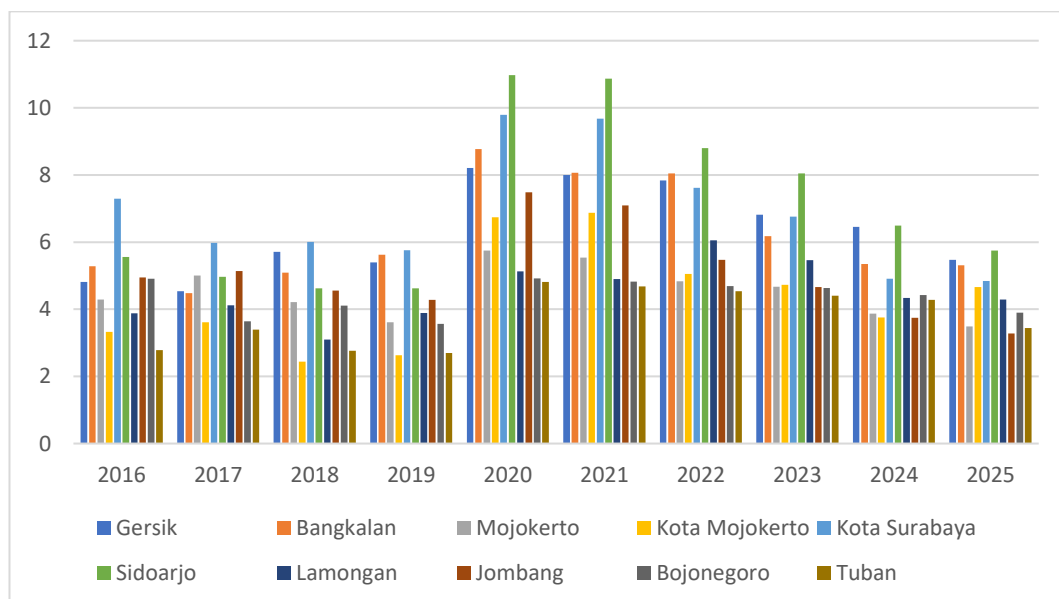
Teori upah subsisten oleh David Ricardo menjelaskan bahwa tingkat upah minimum dapat mempengaruhi kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika tingkat upah minimum meningkat secara proporsional dengan biaya hidup, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan resiko jatuh ke dalam kemiskinan menurun. Selain itu, dijelaskan juga dengan teori upah efisiensi bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga dan penurunan tingkat kemiskinan (Ningsih *et al.*, 2023).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Hotmatius *et al.*, (2022) di Kota Semarang, memperlihatkan bahwa hasil upah minimum terbukti berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Nurshilah (2021) yang membuktikan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Surakarta. Peningkatan upah minimum dapat mengoptimalkan daya beli, penghasilan pekerja, dan kesejahteraan sehingga pada akhirnya mampu menurunkan kemiskinan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum cenderung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, besarnya pengaruh upah minimum dapat berbeda pada setiap wilayah karena dipengaruhi oleh karakteristik pasar tenaga kerja, struktur perekonomian, serta

kondisi sosial ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan, khususnya di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

Salah satu penyebab lain yang berpengaruh pada kemiskinan ialah tingkat pengangguran. Pada pembangunan daerah, pengangguran menjadi hambatan serius karena dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan produktivitas masyarakat, serta memperbesar kesenjangan sosial antar wilayah (Putri *et al.*, 2024). Tingkat pengangguran memiliki keterkaitan yang kuat dengan kemiskinan. Ketika jumlah pengangguran meningkat, maka jumlah penduduk miskin cenderung bertambah karena banyak individu kehilangan sumber pendapatan tetap. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis oleh pemerintah untuk menekan angka pengangguran agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan.



Gambar 1. 4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Wilayah Gerbangkertosusila Plus Periode 2016-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, diolah.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Gerbangkertosusila Plus periode 2016–2025 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan tren peningkatan tajam di hampir semua daerah pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid.

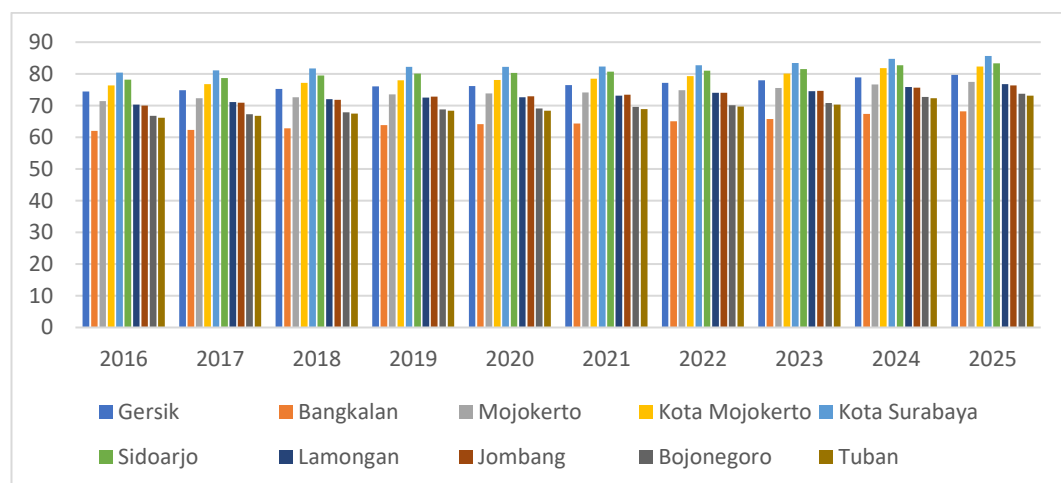
Lonjakan tertinggi tercatat di Kabupaten Sidoarjo, mencapai 10,97% pada tahun 2020, dan Kota Surabaya sebesar 9,79%. Setelah tahun 2021, angka pengangguran menunjukkan tren penurunan bertahap, menandakan proses pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, disparitas TPT antar wilayah masih nyata. Pada tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo (5,75%) dan Gresik (5,47%) masih mencatat angka TPT yang relatif tinggi, mencerminkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di pusat-pusat industri. Sebaliknya, daerah seperti Jombang (3,28%) dan Tuban (3,44%) berhasil menjaga TPT mereka di level yang lebih rendah. Tingginya angka TPT di beberapa daerah mengindikasikan bahwa banyak individu kehilangan sumber pendapatan tetap, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan dan memperkuat urgensi penelitian ini.

Teori Keynes menjelaskan pengangguran terjadi karena kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Tingginya tingkat pengangguran mengindikasikan bahwa banyak individu tidak memiliki sumber pendapatan tetap, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan (Firmansyah et al., 2024). Teori Harris Todaro menambahkan bahwa ketidakseimbangan antara kesempatan kerja di sektor pedesaan dan perkotaan menyebabkan migrasi berlebih ke kota, yang akhirnya menimbulkan pengangguran perkotaan dan memperburuk kemiskinan.

Sejalan dengan itu, temuan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Maryam *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki dampak positif signifikan pada kemiskinan di Provinsi Aceh. Temuan serupa dikemukakan juga oleh Fajriansyah (2022) memperlihatkan jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdampak positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Lain halnya dengan hasil kajian yang

dilaksanakan oleh Hotmatius *et al.*, (2022) ditemukan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, pengangguran belum menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Dengan demikian, temuan tersebut menunjukkan yang mana korelasi antara pengangguran dengan kemiskinan tidak senantiasa sejalan, oleh karena itu diperlukan analisis empiris yang lebih mendalam untuk menilai bagaimana tingkat pengangguran memengaruhi kemiskinan khususnya di wilayah Gerbangkertosusila Plus.

Permasalahan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi pasar kerja dan perekonomian, tetapi juga berkaitan dengan mutu sumber daya manusia. Mutu sumber daya manusia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi dimensi pendidikan, hidup sehat, dan kehidupan yang layak yang berfungsi untuk menentukan kemampuan masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Berikut merupakan gambaran perkembangan IPM di Gerbangkertosusila Plus periode 2016–2025.



Gambar 1. 5 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Gerbangkertosusila Plus Periode 2016-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, diolah.

Data pada gambar 1.5 memperlihatkan tren peningkatan IPM yang konsisten di seluruh kabupaten/kota. Peningkatan IPM ini menandakan bahwa upaya pembangunan manusia di wilayah ini berjalan secara positif dan berkelanjutan, meskipun laju peningkatannya bervariasi antar daerah. IPM tertinggi yakni Kota Surabaya (85,65), Sidoarjo (83,35), dan Kota Mojokerto (82,35) mencerminkan kualitas pembangunan manusia yang baik. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Bangkalan (68,15), Tuban (73,15), dan Bojonegoro (73,74) masih berada jauh di bawah rata-rata kawasan. Selisih antara kelompok IPM tertinggi dan terendah mencapai lebih dari 12–17 poin, menunjukkan ketimpangan pembangunan manusia yang mencolok di dalam satu kawasan metropolitan. Oleh karena itu, hubungan IPM dan kemiskinan perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami bagaimana disparitas kualitas SDM memengaruhi kesejahteraan antar wilayah di Gerbangkertosusila Plus.

Teori modal manusia atau *Human Capital Theory* oleh Schultz (1961), menjelaskan bahwasannya kenaikan mutu aspek pendidikan, hidup sehat, dan standar penghidupan layak yang tercermin pada IPM akan meningkatkan produktivitas serta daya saing tenaga kerja. Orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kesehatan yang baik akan lebih mudah memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan. Sejalan dengan itu, riset yang dilaksanakan Permatasari (2024) mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyumbang dampak negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan komponen IPM seperti pendidikan, hidup sehat, dan kehidupan layak terbukti mampu meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, memperluas peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak langsung pada

penurunan kemiskinan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sukmawati (2018) yang juga memperlihatkan variabel IPM terbukti memberikan dampak yang negatif pada tingkat kemiskinan, semakin naik tingkat pendidikan yang dicapai penduduk, semakin besar pula kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Berbeda dengan hasil temuan dari Praja *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa IPM justru berdampak positif serta tidak signifikan pada persentase penduduk miskin, artinya peningkatan IPM belum tentu menurunkan kemiskinan secara langsung. Kontradiksi ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut guna mengetahui korelasi antara IPM dengan kemiskinan di berbagai tingkat wilayah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel penelitian terhadap tingkat kemiskinan masih menunjukkan hasil yang beragam antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik masing-masing wilayah dapat mempengaruhi hubungan antar variabel. Secara teoritis, kawasan yang berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Surabaya, diharapkan memperoleh efek limpahan yang dapat mendukung penurunan kemiskinan. Namun, fenomena kemiskinan yang masih berbeda antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa hubungan tersebut belum tentu terjadi secara merata. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mempertimbangkan keterkaitan spasial antar wilayah untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus.

Penelitian yang menelaah keterkaitan variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, sistem pengupahan, kondisi pengangguran, serta indeks pembangunan manusia pada kemiskinan banyak dilakukan baik tingkat nasional maupun provinsi, namun penelitian yang secara khusus menguji keempat variabel

tersebut secara simultan pada kawasan Gerbangkertosusila Plus sangat terbatas. Padahal wilayah ini memiliki karakteristik yang sangat heterogen dan menunjukkan kesenjangan pembangunan yang mencolok antar kabupaten/kota. Selain itu, belum ada penelitian yang menguji keempat variabel tersebut menggunakan data terbaru periode 2016–2025, sebuah periode unik yang melibatkan dinamika ekonomi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, yang mempengaruhi aktivitas perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Tidak adanya kajian yang menggabungkan heterogenitas wilayah dan dampak pandemi menegaskan adanya kekosongan penelitian yang perlu diisi. Maka dari itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan mengisi kekosongan tersebut untuk memperoleh pemahaman empiris yang lebih akurat terkait dengan faktor-faktor yang berperan dalam mempengaruhi kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan guna menyajikan bukti empiris yang komprehensif serta masukan strategis bagi kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Plus. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Wilayah Gerbangkertosusila Plus Tahun 2016–2025"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menganalisis pengaruh variabel-variabel penelitian terhadap kemiskinan dengan menggunakan pendekatan regresi spasial data panel. Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus periode 2016–2025?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus periode 2016–2025?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus periode 2016–2025?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus periode 2016–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016-2025.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016-2025.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016-2025.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Plus selama periode 2016-2025.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kontribusi serta manfaat pada ranah teoretis dan praktis, yang penjelasannya disajikan pada bagian berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori ekonomi pembangunan, khususnya terkait kajian kemiskinan dalam konteks wilayah metropolitan, karena selama ini sebagian besar penelitian mengenai kemiskinan lebih banyak berfokus pada level nasional atau provinsi, sehingga bukti empiris pada wilayah metropolitan seperti Gerbangkertosusila Plus masih relatif terbatas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur terkait hubungan antar variabel ekonomi dan sosial dalam konteks keterkaitan spasial antarwilayah, sekaligus memperluas cakupan teori yang ada dengan menghadirkan bukti empiris terbaru dari kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di kawasan Gerbangkertosusila Plus dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat

sasaran dan berbasis data. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maupun perumusan kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi khusus akibat lambatnya penurunan tingkat kemiskinan. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait kemiskinan dan pembangunan wilayah.